

FORMULASI PERATURAN NAGARI BERBASIS PROBLEM SOSIAL

Erianjoni, Siska Sasmita, Fatmariza, Yurni Suasti, Erniwati,
Pusat Riset Gender dan Pembangunan
Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Fatmariza**
E-mail: fatmariza@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Komposisi Masyarakat Sumatera Barat yang cenderung homogen baik dari sisi suku bangsa, ras, dan agama tidak mengeliminasi berkembangnya permasalahan sosial. Salah satunya adalah isu kemiskinan yang lebih banyak menysasar kaum Perempuan. Problem-problem sosial yang berkelindan dengan sosok dan peran perempuan secara individu maupun komunal seringkali diselesaikan dengan strategi konvensional berupa pengenaan sanksi yang lagi-lagi merugikan Perempuan. Oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas pemerintahan nagari melalui tiga desain kegiatan utama yaitu sosialisasi, workshop, dan pendampingan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pusat Riset Gender dan Pembangunan Universitas Negeri Padang. Kegiatan ini berlokasi di nagari Toboh Ketek berada dalam Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. kegiatan ini mengasah kepekaan perangkat nagari tentang pentingnya merevisi bahkan menciptakan peraturan nagari yang beranjak dari permasalahan yang dihadapi warga, bukan sekedar ikut-ikutan tren atau latak latak dalam menghasilkan Peraturan Nagari.

Kata Kunci: *Pernag, problem sosial, kemiskinan, aparat nagari*

ABSTRACT

The composition of West Sumatra society which tends to be homogeneous in terms of ethnicity, race, and religion does not eliminate the development of social problems. One of them is the issue of poverty which targets more women. Social problems that are intertwined with the figure and role of women individually and communally are often resolved with conventional strategies in the form of imposing sanctions which again harm women. Therefore, it is necessary to increase the capacity of the village government through three main activity designs, namely socialization, workshops, and mentoring. This activity was carried out by the Gender and Development Research Center Team of Padang State University. This activity is located in Toboh Ketek village, which is in Enam Lingkung District, Padang Pariaman Regency. This activity sharpens the sensitivity of village officials about the importance of revising and even creating village regulations that start from the problems faced by residents, not just following trends or following trends in producing Village Regulations.

Keywords: *Village regulations, social problems, poverty, village officials*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Masyarakat Sumatera Barat memiliki komposisi yang cenderung homogen baik secara suku bangsa, ras, maupun agama. Febriani, Walidi, & P. Mbeo¹ menyatakan bahwa lebih dari 95 persen penduduk Sumbar beragama Islam yang secara mayoritas merupakan suku Minangkabau. Kesamaan latar belakang ini menyebabkan daerah-daerah di Sumatera Barat relatif stabil dari gangguan/konflik yang dipantik menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Namun, homogenitas tidak mengeliminasi berkembangnya permasalahan sosial. Jenis dan jumlah problem sosial seakan linear dengan kompleksnya pola kehidupan manusia modern. Isu paling mengemuka di Sumatera Barat seperti halnya provinsi-provinsi lain di Indonesia adalah kemiskinan. Meskipun jumlah orang terkategori miskin menurun secara statistik, ragam masalah kemiskinan tak pernah habis. Masing-masing kabupaten/kota berjuang mengatasi kemiskinan individu dan komunal yang dihadapi daerahnya. Hulu dari kemiskinan ini diantaranya adalah pengangguran. Jumlah pengangguran di Sumbar yang mengalami peningkatan tiap tahunnya disinyalir membawa efek bola salju tidak hanya sebagai masalah ekonomi namun juga sosial kemasyarakatan.

Berbeda dengan permasalahan ekonomi yang relatif mudah diintervensi, misalnya melalui skema insentif, subsidi, *voucher* dan lainnya; merumuskan pemecahan masalah sosial cenderung sulit karena terkait dengan perilaku manusia yang tidak terprediksi. Desain solusinya pun tidak bisa seragam; eksklusivitas berpotensi terjadi karena keharusan mengakomodasi karakter individu, kelompok, dan lingkungan setempat. Beranjak dari dinamika sosial tersebut sekaligus keinginan untuk berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah sosial, Pusat Riset Gender dan Pembangunan (PRGP) dan Universitas Negeri Padang (UNP) menggagas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam skema nagari binaan. Fokus utama kegiatan nagari binaan di tahun pertama ini adalah permasalahan sosial yang terjadi di nagari.

Seiring dengan penetapan Pauh Kamba dan Toboh Ketek sebagai *pilot project* Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), maka kegiatan nagari binaan kali ini dilakukan di Nagari Toboh Ketek. dengan fokus. Nagari Pauh Kamba tidak menjadi lokasi kegiatan tahun 2022 yang berfokus pada perancangan perna berbasis masalah sosial terutama yang melingkupi kehidupan perempuan dan anak di nagari karena pada saat bersamaan Pauh Kamba juga tengah mendapatkan pendampingan oleh tim advokasi PRGP UNP. Toboh Ketek berada dalam Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Secara geografis, nagari ini berjarak sekitar 46 km dari ibukota Provinsi Sumatera Barat atau 8,6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Penduduknya berjumlah 1.811 jiwa

yang berada dalam 559 rumah tangga, dan dengan komposisi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki yaitu 936 berbanding 875 jiwa.

Kajian awal yang dilakukan di Nagari Toboh Ketek menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah penduduk perempuan (sekitar 371 jiwa) berpendidikan sekolah dasar dan berprofesi ibu rumah tangga. Kondisi ini memang tidak serta merta menunjukkan korelasi antara banyaknya jumlah penduduk atau latar belakang pendidikan perempuan dengan masalah sosial. Namun, Henley menyebutkan bahwa perempuan telah lama menjadi problem sosial ketika mereka menyimpang dari norma-norma sosial. Lebih lanjut Henley² menyatakan bahwa banyak tindak tanduk perempuan yang membuatnya lekat dengan stempel masalah sosial. Ketika perempuan mematuhi norma-norma sosial secara ketat pun ia tetap dianggap sebagai masalah sosial, misalnya perempuan yang mengikuti peran tradisional hingga muncul istilah sindrom ibu rumah tangga. Perempuan yang tidak berkontribusi bagi perekonomian keluarga adalah masalah sosial. Sama halnya dengan perempuan yang memilih terjun ke dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga yang kemudian dianggap mengabaikan anak-anaknya.

Perempuan juga dikaitkan dengan masalah sosial sebagai korban. Meski berposisi sebagai korban mereka tetap disalahkan atas timbulnya sebuah masalah sosial. Mereka dikatakan secara patologis mencari pelaku atau menolak untuk meninggalkan si pelaku, memprovokasi, dan sebagainya. Dalam bahasa ilmuwan sosial kekinian perempuan tidak jarang dilabeli sebagai pencetus sebuah tindak kejahatan. Problem-problem sosial yang berkelindan dengan sosok dan peran perempuan secara individu maupun komunal seringkali diselesaikan dengan strategi konvensional berupa pengenaan sanksi yang lagi-lagi merugikan perempuan. Di sejumlah negara barat, penyelesaian hal ini mulai mengarah pada upaya penyediaan layanan dan peraturan yang memperhatikan hak-hak perempuan. Strategi semacam ini tidak bermakna mengglorifikasi perempuan, namun bagian dari meretas rencana aksi menuju pengarusutamaan gender dalam kebijakan di setiap level pemerintahan. Paparan berikut menguraikan metode, proses, dan hasil dari kegiatan PKM skema nagari binaan yang diinisiasi dengan tema formulasi kebijakan, berfokus pada problem sosial nagari khususnya terkait perempuan dan anak, serta berlokasi di Nagari Toboh Ketek.

METODE PENELITIAN

Tidak serta merta semua masalah sosial yang merugikan perempuan dan anak bisa disimpulkan sebagai problem sosial yang kemudian bermuara pada pembentukan kebijakan baru di level nasional maupun lokal. Dalam konteks kebijakan publik, fenomena yang merugikan perempuan –seperti yang teridentifikasi sebelumnya –diistilahkan sebagai isu kebijakan. Isu-isu tersebut harus melewati proses pendefinisian hingga bisa diklaim sebagai permasalahan kebijakan. Proses pendefinisian masalah menentukan isu-isu apa yang masuk dalam agenda kebijakan, serta tindakan khusus apa yang diambil, dipertahankan atau tidak diambil maupun

dipertahankan. Pada proses ini akan terlihat pula bagaimana aktor kebijakan menginterpretasi peristiwa saat ini dan masa lalu sebagai bagian dari cara mereka mendefinisikan masalah. Tim PRGP UNP mendesain tiga kegiatan utama yang bermuara pada peningkatan kapasitas perangkat dan masyarakat nagari dalam merumuskan peraturan nagari (perna) berdasarkan permasalahan sosial yang diidentifikasi bersama oleh para stakeholder. Kegiatan tersebut adalah: sosialisasi, pelatihan dan workshop, serta pendampingan. Ketiga kegiatan tersebut diselenggarakan di tiga tempat yang berbeda pula agar peserta mendapatkan pengalaman berbeda dan tidak merasa monoton dengan aktivitas rutinnnya.

Sosialisasi, *workshop*, dan pendampingan merupakan rangkaian kegiatan yang identik dengan induksi pemikiran dan pengalaman bagi pihak-pihak yang menjadi 'pendatang baru' dalam bidang atau organisasi tertentu. Sosialisasi merujuk pada proses dimana individu menjadi bagian dari komunitas tertentu yang kelak mampu berpartisipasi. Proses ini ditandai dengan diperolehnya pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma baik dari keahlian tertentu maupun komunitasnya. Workshop (lokakarya) adalah komponen berikutnya dari program induksi yang bersifat praktik reflektif yang memungkinkan si pendatang baru menganalisis dan memikirkan pengalaman mereka saat bekerja atau di tempat kerja sambil menghubungkan teori dan praktik. Sedangkan pendampingan adalah aktivitas membantu pendatang baru menyesuaikan diri dengan kebutuhan tugas dan lingkungan organisasi barunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM skema nagari binaan yang dilaksanakan di Toboh Ketek ini dibuka bersamaan dengan pelaksanaan PKM advokasi kebijakan percontohan DRPPA yaitu pada 12 Juli 2022 yang berlokasi di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman. Setelah serangkaian aktivitas protokoler, kegiatan resmi dibuka oleh Bupati Padang Pariaman diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan. Kegiatan sosialisasi fase pertama diisi oleh dua pembicara yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) Gemala Ranti, yang memaparkan tentang program dan kegiatan DP3A P2KB yang harus selaras dengan kebijakan nasional dengan fokus pada Lima Arah Presiden Republik Indonesia, yang poin mengedepankan perspektif gender dan perlindungan anak.

Paparan kedua yang mengerucut pada pembahasan mengenai problem sosial disampaikan oleh Dr. Erianjoni, M.Si. Pembicara menelisik masalah sosial dari sisi konseptual dan praktikal. Ketika pembicara mengajak peserta mengidentifikasi permasalahan sosial yang secara spesifik dihadapi kelompok-kelompok tertentu seperti anak dan remaja, perempuan, serta kelompok rentan lainnya, suasana menjadi penuh tawa dengan deskripsi yang menggelitik dari pembicara maupun respon peserta. Di bagian akhir disampaikan pula urgensi dan bentuk intervensi pemerintah nagari dalam mengatasi permasalahan sosial yang muncul dalam

wilayah kewenangannya. Kegiatan sosialisasi pada fase pertama ini dapat terlihat pada gambar di halaman berikutnya.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi fase pertama di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman



Sumber: dokumentasi pengabdian

Sosialisasi fase kedua berlangsung pada tanggal 26 Juli 2022 di Kantor Kecamatan Nan Sabaris. Narasumber yang dihadirkan adalah konselor UNP yang membahas tentang keharmonisan keluarga. Kegiatan yang dihadiri oleh 25 peserta dari perangkat Nagari Toboh Ketek dan perwakilan Kecamatan Nan Sabaris ini memuat amanat untuk kembali membangun ketahanan keluarga sebagai benteng menghadapi kompleksnya permasalahan kehidupan modern. Pada sesi kedua, akademisi UNP Isnarmi Moeis, menyampaikan pesan mengenai pentingnya mengamalkan ajaran agama, lainnya orang Minangkabau yang berpegang erat pada *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dalam upaya menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi fase kedua yang dilaksanakan di Kantor Camat Nan Sabaris



Sumber: dokumentasi pengabdian

Kegiatan kedua yang bertajuk pelatihan dan workshop berlangsung pada 2 Agustus 2022 di Kantor Nagari Toboh Ketek dihadiri 25 peserta dari Perangkat dan Bamus Nagari Toboh Ketek. Dua narasumber mengisi kegiatan ini yakni Khairul Fahmi dan Siska Sasmita. Narasumber pertama mengupas praktik perumusan peraturan nagari yang kemudian mendapat banyak respon dari peserta terkait implementasi dari praktik baik berdasarkan pengalaman narasumber di tempat lain. Narasumber kedua melengkapi paparan narasumber pertama dengan mendiseminasi pesan terkait pentingnya keberadaan peraturan nagari yang di satu sisi tidak bias gender namun di sisi lain reponsif terhadap kebutuhan gender.

Kegiatan 2. Workhop formulasi peraturan nagari berbasis problem sosial
di Kantor Nagari Toboh Ketek



Sumber: dokumentasi pengabdian

Kegiatan ketiga yang bertajuk pendampingan belum sepenuhnya terealisasi. Seyogianya kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022, akan tetapi karena kendala ketidakcocokan waktu, kegiatan pendampingan ini masih tertunda. Tim PRGP telah mengumpulkan naskah peraturan nagari yang tersedia dalam versi cetak dan tengah melakukan tahapan pra-analisis. Kegiatan PKM skema nagari binaan yang dilakukan oleh Tim PRGP UNP ini secara umum mendapatkan respon positif dari para peserta karena mengakomodasi kebutuhan perangkat nagari terkait implementasi kebijakan DRPPA. Wali Nagari Toboh Ketek bahkan meminta penjadwalan kegiatan lanjutan di nagari mereka untuk tahun depan.

KESIMPULAN

Membiarkan perempuan dan anak menjadi sasaran kebijakan publik yang bias gender berpotensi semakin merugikan posisi perempuan sebagai individu maupun di ranah publik. Kegiatan PKM skema nagari binaan ini digagas untuk mendiseminasi pengetahuan sekaligus memantik praktik perumusan peraturan nagari yang responsif gender dan peduli hak-hak anak. Bermula dari ranah administratif terkecil yakni nagari, para perangkat dan masyarakatnya diedukasi untuk memahami isu-isu sosial yang berkembang, mengidentifikasinya sebagai probelem sosial, untuk kemudian mampu menghadirkan peraturan nagari yang merepresentasikan responsivitas gender dan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Meskipun belum sampai pada praktik komprehensif, kegiatan ini mengasah kepekaan perangkat nagari tentang pentingnya merevisi bahkan menciptakan peraturan nagari yang beranjak dari permasalahan yang dihadapi warga, bukan sekedar ikut-ikutan tren atau latah latah dalam menghasilkan perna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terlaksana berkat dukungan Universitas Negeri Padang melalui skema Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, Rika, Atri Walidi, and Narwastuyati P. Mbeo. "Urgensi Pendidikan Multikultural Pada Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab Di SMK Di Padang)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 27, no. 2 (2021): 208.
- Hearn, Jeff, and Linda McKie. "Gendered and Social Hierarchies in Problem Representation and Policy Processes: 'Domestic Violence' in Finland and Scotland." *Violence Against Women* 16, no. 2 (2010): 136–158.
- Henley, Nancy M. "Women as a Social Problem Conceptual and Practical Issues in Defining Social Problems." In *Redefining Social Problems*, edited by Edward Seidman and Julian Rappaport, 65–79, 1986. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-2236-6_5.
- Koduah, Augustina, Irene Akua Agyepong, and Han van Dijk. "'The One with the Purse Makes Policy': Power, Problem Definition, Framing and Maternal Health Policies and Programmes Evolution in National Level Institutionalised Policy Making Processes in Ghana." *Social Science and Medicine* 167 (2016): 79–87.
- Nasser-Abu Alhija, Fadia, and Barbara Fresko. "Socialization of New Teachers: Does Induction Matter?" *Teaching and Teacher Education* 26, no. 8 (2010): 1592–1597.